

STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM MEMENANGKAN CALON MUSLIM PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA MANADO

Alif Afdhal*

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Coessponding Author: alifafdal@gmail.com

ABSTRAK

Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019, para calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) cukup banyak yang berhasil dalam meraih dukungan masyarakat pemilih. Hal itu tentu tidak terlepas dari peran Partai Amanat Nasional dalam menjalankan strategi partai. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiono, 2014), penelitian ini akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh Partai Amanat Nasional dalam memenangkan para calon anggota legislative yang diusungnya. Strategi PAN tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan strategi yang dikemukakan oleh Adman Nursal (2004) tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa strategi yang dimainkan oleh Partai Amanat Nasional untuk memenangkan para calon yang diusungnya sangat bervariasi. Adapun bentuk strateginya ada yang bersifat ofensif ada juga yang bersifat defensive. Selain itu strategi yang juga dimainkan seperti, memanfaatkan ketokohan calon, strategi pencitraan, dan strategi kelembagaan. Hal lain yang juga diperhitungkan adalah bagaimana pertimbangan yang dilakukan dalam perekrutan calon.

Kata Kunci: Strategi; Partai Politik; Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg)

ABSTRACT

In the 2019 General Election of Legislative Members (Pileg), there were quite a number of candidates nominated by the National Mandate Party (PAN) who succeeded in gaining support from the voters. This of course cannot be separated from the role of the National Mandate Party in carrying out the party's strategy. By using qualitative methods (Sugiono, 2014), this study will examine the strategies played by the National Mandate Party in winning over the legislative candidates it carries. The PAN strategy will be studied using the strategic approach proposed by Adman Nursal (2004) regarding political strategies. The research findings illustrate that the strategy played by the National Mandate Party to win over the candidates it carries is very varied. As for the strategic forms, some are offensive and some are defensive. Apart from that, the strategies that are also being played are utilizing the character of candidates, imaging strategies, and institutional strategies. Another thing that is also taken into account is how the consideration is made in recruiting candidates.

Keywords: Strategy; Political parties; Election of Legislatf Members (Pileg)

PENDAHULUAN

Pemilihan anggota legislatif di Indonesia adalah salah satu kontestasi yang menyita perhatian masyarakat, itu dikarenakan pemilihan anggota legislatif adalah sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan pendapat dan kritikan kepada negara melalui seorang legislator yang mewakili daerah mereka, baik itu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tentunya harus mempunyai persiapan yang matang, baik itu materi, gagasan maupun kendaraan untuk mencapai tujuan dalam hal ini Partai Politik sebagai pengusung calon.

Partai politik adalah salah satu dari instrumen demokrasi, dimana sebuah partai politik dapat meningkatkan kualitas dari demokrasi yaitu melalui pemilihan umum karena keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang dapat disalurkan melalui partai politik. Banyak juga kekuatan sosial masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada partai

politik. Sejarah partai politik di Indonesia juga merupakan bukti dari aktualisasi masyarakat yang dilembagakan, yaitu banyak entitas dalam masyarakat yang menyatukan diri dengan membentuk partai politik.

Pemilu di Indonesia bisa jadi merupakan ajang dimana para elit politik menyusun rencana atau yang disebut dengan strategi, strategi digunakan untuk mengukur atau memperkirakan seberapa besar kemungkinan kalah atau menang dalam sebuah kontestasi. Baik mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan maupun presiden-wakil presiden harus sudah memiliki strategi kampanye untuk pemasaran politik di khalayak. Strategi kampanye menjadi penting dan mutlak bagi para actor yang akan bertarung dalam arena Pileg dan Pilpres tersebut; strategi yang tepat berujung pada kemenangan, dan sebaliknya kekalahanlah yang akan diperoleh jika strategi yang digunakan tidak tepat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilu di Indonesia selain sebagai syarat untuk menjalankan roda pemerintahan di negara demokrasi juga merupakan ajang untuk beradu strategi, Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.

Pada mulanya partai politik lahir sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional, kesadaran akan satu bangsa. Kesadaran bahwa manusia hidup secara berkelompok dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemunculan partai politik salah satunya merupakan alat pemersatu bangsa karena mengingat banyaknya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dengan adanya partai politik tidak ada lagi diskriminasi antar suku dan saling ego dengan menganggap sukunya yang lebih baik lalu berjuang dengan memilih jalan dengan sendirinya. Kesadaran bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Kesadaran akan adanya kesamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang politik juga menunjang lahirnya sebuah partai politik.

PAN adalah partai politik yang menjadikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Cita-cita tertinggi dari PAN yakni menegakkan keadilan dalam mengelola sumber daya untuk didistribusikan secara merata. Selibhnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia Baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Melihat kembali ke belakang sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), diawali dari hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah, 5-7 Juni 1998 di Semarang – Jawa Tengah. Waktu itu, Komisi C merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mempersiapkan berdirinya satu partai politik. Pada saat penutupan sidang, Amien Rais mengumumkan akan membentuk partai politik baru yang kini dikenal dengan PAN. Sejak itulah pertautan hubungan historis dan emosional antara Muhammadiyah – PAN terpatri kuat.

Keterlibatan aktivis, pengurus dan warga Muhammadiyah pada awalnya dalam pendirian PAN yang begitu massif dan intens menjadi salah satu faktor pendorong cepatnya perluasan infrastruktur PAN. Sedikit banyaknya keberadaan PAN sangat membantu dengan berdirinya di daerah, semua berkat keterlibatan jaringan infrastruktur Muhammadiyah yang sebelumnya sudah ada di seluruh wilayah republik ini. Begitu PAN dideklarasikan 23 Agustus 1998, diikuti pembentukan PAN di wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat menjadi inisiator dalam komite pendirian PAN mayoritas berasal dari aktivis, pengurus dan warga Muhammadiyah. Memang kita tidak bisa menutup mata kepada para inisiator yang terlibat bukan berasal aktivis, fungsionaris dan warga Muhammadiyah.

Menyangkut hubungan PAN dengan Muhammadiyah memang sangat sulit untuk memutuskannya, mengingat historis dan kultural kelahiran partai ini adalah hasil ijtihad Muhammadiyah sendiri. Faktualnya secara organisatoris, tidak ada hubungan antara PAN dan Muhammadiyah. Tapi, ada benang merah yang mengikat kuat antara PAN dengan Muhammadiyah. Dimana keberadaan PAN sampai kapanpun tidak akan bisa dilepaskan dengan Muhammadiyah.

Partai ini memiliki azas “Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini pada dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.

Partai amanat nasional (PAN) di kota Manado sendiri di dominasi kader dengan latar belakang Muhammadiyah, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kader dengan latar belakang Nahdatul Ulama atau mungkin kader dari agama selain islam. Sepak terjang partai ini tidak bisa dianggap remeh, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR. itu terbukti pada pemilu legislatif 2019 PAN berhasil mendapatkan 44 jatah kursi di DPR RI, untuk pemilihan legilatif di Provinsi Sulawesi utara, PAN mengantongi 2 kursi, 1 kursi dari dapil I Manado milik Ayub Ali Albugis, satu lagi dari dapil IV Bolmong Raya milik Nursiwin Dunggio. Sedangkan untuk pemilu legislatif di kota Manado pada tahun 2019, Ada 39 orang calon dari 5 daerah pemilihan di kota Manado PAN berhasil mendapatkan jatah 4 kursi.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Strategi Politik

- ***Pengertian Strategi Politik***

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun *stratēgos* dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Jact Trout dalam Sidarta mendefinisikan strategi sebagai beberapa cara untuk membuat kita menjadi tampak unik dibandingkan yang lain atau pesaing, serta memanfaatkan keunikan itu agar diingat pelanggan dan calon-calon pelanggan, lalu (mereka) memiliki kerelaan untuk menggunakan produk (barang atau jasa) yang kita produksi. Petuah tersebut dikenal dalam kompetisi bisnis. Namun demikian tidak tak salah bila merujuknya ke persaingan politik. Apalagi menyadari bahwa kompetisi dalam dunia bisnis tak ubahnya “irisan” atau sebagian dari strategi dalam dunia politik.

Strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan (ends), sarana (means), dan cara (ways). Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

Menurut Peter Schorder strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi berbicara masalah tehnik pendekatan kontenstan pada kelompok pemilih. Oleh karena itu, Strategi politik harus dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pertarungan politik.

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.

Bagi setiap Partai Politik strategi dalam mengikuti atau memenangkan Pemilihan Umum adalah sesuatu hal yang harus dimiliki dan ini juga merupakan bagian dari Grand strategi Partai Politik, yaitu Strategi Politik. Sebuah bentuk strategi politik yang khusus adalah strategi pemilihan umum, yang diutamakan disini adalah memperoleh kekuasaan dan sebanyak

mungkin pengaruh dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, sehingga politik dapat diwujudkan dalam suatu perubahan dalam masyarakat dapat tercapai.

Dalam masyarakat demokratis, pemilu yang demokratis dalam berbagai bentuk dan kemungkinannya dilaksanakan sebelum seseorang dapat mengambil alih kekuasaan dan mendapat kemungkinan untuk memiliki pengaruh. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan harus memperoleh suara yang cukup dalam pasar pemilu agar ia dapat memiliki pengaruh. Oleh sebab itu, pertempuran untuk memperoleh suara, pemilih harus direncanakan dengan hati-hati dan untuk itu dibutuhkan apa yang disebut dengan 'Strategi'.

Strategi pemilu untuk memperoleh kekuasaan seringkali dipandang sebagai hal yang buruk, bahkan oleh partai yang bersangkutan. Tetapi tanpa adanya kekuasaan ini bagi calon atau partai terkait, konsep politik lain yang bukan merupakan konsep politik merekalah yang akan diterapkan. Padahal konsep politik lain itu menurut pandangan para politisi, suatu partai biasanya lebih buruk daripada konsep mereka sendiri. Ada beberapa konsep strategi politik dalam upaya kemenangan pemilu.

Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon anggota legislatif yang didukung partainya untuk duduk pada posisi strategis yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Jadi, strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

- ***Jenis-Jenis Strategi***

Menurut Peter Schorder strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Untuk dapat menetapkan pilihan yang tepat, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan. Ada beberapa jenis-jenis strategi :

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif selalu diperlukan jika partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau jika seorang eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Dalam hal ini, kampanye dapat berhasil hanya jika ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai. Yang termasuk strategi ofensif adalah "strategi memperluas pasar" dan "strategi menembus pasar".

- a. Strategi perluasan pasar

Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Strategi ini perlu disiapkan melalui sebuah kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru apa saja dan penawaran mana saja yang lebih baik, dibanding dengan penawaran partai-partai lainnya.

Bagi partai sendiri, persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan:

- Platform partai harus disertakan dan melengkapi program yang baru
- Bersamaan dengan ditampilkannya program baru, profil partai juga akan berubah. Karena itu, profil yang baru harus tetap dapat diterima oleh pemilih lama, sehingga bertambahnya jumlah pemilih baru tidak diiringi oleh hilangnya lama, atau jumlah pemilih
- Orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu. Orang-orang tersebut harus menampilkan keselarasan program dan individu.
- Program atau isu baru tidak dapat dimunculkan secara tiba-tiba. Sebelumnya para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih harus sudah dipersiapkan melalui program pengembangan SDM.

- b. Strategi menembus pasar

Strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih

optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki kelompok target dimana keberhasilan telah diperoleh sebelumnya.

2. Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan.

a. Strategi mempertahankan pasar

Strategi ini merupakan tipikal strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya. Partai pemerintahan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka. Partai yang ingin mempertahankan pasar akan mengambil sikap yang bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Bila partai-partai lain berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran yang lebih menarik, sebaliknya partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru berupaya agar perbedaan yang ada tidak dikenali.

b. Strategi melepas atau menyerahkan pasar

Strategi melepas pasar dapat memiliki dua arti. Pertama, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur dengan partai lain. Kedua, dalam pemilu yang menggunakan kertas suara balot, dimana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh kandidat terkuat dalam pemilu tahap pertama, penyerahan pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang sangat sering terjadi.

3. Strategi Pencitraan

Strategi ini banyak digunakan di media elektronik seperti televisi atau radio dan media seperti facebook, twitter, instagram dll. Selain itu media cetak juga sering digunakan untuk para calon untuk membangun pencitraan masing-masing calon. Politik pencitraan sendiri bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, misalnya seorang pejabat publik melakukan aksi sosial di suatu daerah, dalam sudut pandang pejabat publik, kegiatan tersebut merupakan keharusan yang ia lakukan untuk melayani masyarakat, dalam sudut pandang yang lain, aktivitas aksi sosial tersebut bisa dikatakan pencitraan untuk menarik simpati/perhatian masyarakat daerah tersebut demi meraih suara ataupun dukungan politik.

Strategi pencitraan biasa digunakan untuk membangun pola pikir masyarakat terhadap partai atau calon tertentu. Strategi ini cocok digunakan oleh partai baru yang ingin memperkenalkan partai dan calonnya kepada masyarakat umum guna meningkatkan jumlah pemilihnya.

4. Strategi Ketokohan Dan Kelembagaan

Langkah pertama dalam strategi politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya ketokohan seseorang politikus dan kemandirian lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat. Pada hakikatnya, suatu strategi dalam politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi politikus untuk mencapai tujuan politik ke depan, terutama memenangkan pemilihan umum.

Ketika sebuah komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan pesan politik saja, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang politikus dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

a. Merawat Ketokohan

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan, yang oleh Rakhmat (2005) dengan menghormati Aristoteles, menyebutnya sebagai ethos. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Orang yang memiliki ketokohan menurut Nimmo dapat disebut juga sebagai pahlawan politik. Ketokohan dalam politik, kemudian dapat melahirkan kepahlawanan politik dan kharisma diperoleh karena kredibilitas, yaitu dapat dipercaya karena karakter atau moralitas yang terpuji dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Citra diri komunikator politik bagi khalayak dapat terbentuk melalui pengalaman langsung, yaitu melalui pergaulan dan aktivitas yang lama dengan tokoh politik atau pahlawan politik, yang menjadi komunikator politik itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya komunikator yang mampu mempengaruhi khalayak adalah komunikator yang memiliki ketokohan dan kepemimpinan (leadership) dengan memiliki keseluruhan syarat yang dikemukakan pada uraian diatas. Kepemimpinan berarti kemampuan menggerakkan dan mempengaruhi orang banyak. Dengan demikian, komunikator politik (politikus, aktivis dan professional) yang memiliki kepemimpinan akan mudah dan cepat mempengaruhi khalayak.

b. Memantapkan Kelembagaan

Selain memelihara ketokohan, langkah strategis utama dan pertama yang harus dilakukan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga. Hal tersebut sangatlah penting sebagai faktor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Lembaga yang dimaksud adalah wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam dunia politik, lembaga itu dapat berupa partai politik, parlemen, dan pemerintahan atau birokrasi. Lembaga-lembaga nonpolitik pada dasarnya juga memiliki kekuatan politik, meskipun kecil dan tentu tidak sama dengan kekuatan lembaga politik. Sesungguhnya lembaga juga memiliki karakteristik seperti manusia yang meliputi eksistensi, kepribadian, dan aktivitas. Justru itulah, lembaga juga dipersepsi oleh khalayak dan berdasarkan persepsi itu akan terbangun citra diri dari lembaga, misalnya citra diri dari partai politik, citra diri parlemen, dan citra diri birokrasi.

Ketokohan yang prima dan partai politik yang besar dan terpercaya akan menjadi kekuatan politik tersendiri dalam membangun komunikasi politik yang efektif. Artinya, partai politik dan kandidat yang diajukan dalam pemilihan umum akan dicari oleh rakyat, sebagai pahlawan politik, yang pantas menduduki jabatan-jabatan politik yang sedang diperebutkan.

B. Konsep Partai Politik

• Pengertian Partai Politik

Partai politik berakar dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa mengatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang serupa atau sama sehingga pikiran dan orientasi mereka dikonsolidasikan.

Secara etimologis Partai dapat ditelusuri jejaknya dari bahasa latin, yaitu Partire yang bermakna "membagi" atau "memilah" atau juga bisa disejajarkan dengan kata Part yang bermakna bagian. Sedangkan menurut istilah, Santori memberi pengertian partai politik sebagai kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan, melalui pemilihan umum, para calon untuk duduk dalam Legislatif dan pemerintahan.

Dalam bukunya Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Meriam Budiardjo membuat batasan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Secara umum, Partai Politik adalah beberapa kelompok yang terorganisir dan memiliki anggota-anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Pendapat lain mendefinisikan Partai politik sebagai kelompok yang terorganisasi, ditandaidengan adanya Visi, misi, tujuan, platform, dan program dan agenda dan mengikuti pemilihan umum untuk meraih kekuasaan atau jabatan legislatif dan eksekutif. Sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 2002, Partai Politik yakni salah satu organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia dengan sebuah cara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan sebuah kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui sebuah pemilihan umum.

Hampir sama dengan pendapat Carl J. Friedrich, yang mengatakan bahwa Partai Politik yaitu salah satu kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan hak penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan tersebut memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

Partai politik adalah sarana politik yang mengatur tentang elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara.

Menurut Mark N. Hogapain, Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangan dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Alam Ware dalam bukunya, *Political Parties and Party System*, mengemukakan bahwa partai politik adalah institusi politik yang mencari pengaruh dalam suatu Negara, dengan tujuan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan dan beberapa hal, partai politik berusaha mengagregasikan kepentingan dalam masyarakat, sehingga kepentingan masyarakat dapat tersalurkan melalui partai politik.

- **Fungsi partai politik**

Partai politik berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada.

Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang pemerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan dipihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai alat sosialisasi politik. Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa. Disisi lain sosialisasi politik merupakan proses dimana masyarakat menyampaikan budaya politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor terbentuknya budaya politik suatu bangsa.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai

untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Sementara itu Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Dalam setiap kontestasi politik yang tentunya melibatkan partai politik, hal buruk yang kemungkinan besar akan terjadi adalah konflik. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat, tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Disisi peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik secara umum yaitu :

- Membincangkan dan menyebarluaskan saran serta kebijakan pemerintah.
- Membantu memikirkan pertimbangan rumusan kebijakan.
- Memegang sebagian control terhadap pemerintah.
- Sebagai sarana untuk pendidikan politik.
- Sebagai pengatur konflik.
- Sarana untuk mencalonkan individu dalam pemilu.
- Menanamkan ideologi dan loyalitas kepada setiap bangsa dan negara.

C. Konsep Pemilihan Umum

• Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 1945, pasal 22E ayat (2) disebutkan: "pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Penyebutan penyelenggaraan pemilu untuk beragam kepentingan dalam satu kalimat ini menggambarkan pemilu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pemilihan umum juga dapat didefinisikan sebagai salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik. Hal lain juga menyebutkan Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti Presiden, Wakil Rakyat sampai kepala desa. Menurut Ramlan pemilihan Umum (pemilu) adalah mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E sebagai hasil Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Secara lengkap, bunyi Pasal 22E tersebut adalah: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

1. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
4. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR pada 21 Juli lalu kini sudah resmi bisa diberlakukan. Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sedangkan ciri demokratisasi menurut Maswadi yaitu :

1. Berlangsungnya secara evolusioner, yakni demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama.
2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif, yakni demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan.
3. proses yang tidak pernah selesai, demokrasi berlangsung terus menerus.

D. Konsep Legislatif

- **Pengertian Legislatif**

Legislatif atau legislature adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum atau peraturan. Legislatif mempunyai nama lain seperti parlemen, kongres, dan assembly (berkumpul) nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif.

Sedangkan dalam sistem presidensil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Menurut Budiardjo (2007), badan legislatif adalah : “lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat.

Maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen. DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat dengan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang disusunnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu”. Menurut Surbakti (1999:39), pemilihan umum legislatif dianggap salah satu ciri demokrasi modern di tingkat lokal. Pemilihan berarti prosedur yang diakui oleh aturan-aturan organisasi, memilih sejumlah orang atau satu orang untuk memegang jabatan dalam suatu organisasi.

- **Fungsi Badan Legislatif**

Menurut Surbakti (1999:66),Badan legislatif memiliki beberapa fungsi, akan tetapi ada beberapa fungsi utama yang dimilikinya. Yaitu :

1. Fungsi untuk menentukan kebijakan (policy) dan membuat undangundang. Maka dari itu, badan ini diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama dibidang budget atau anggaran.
2. Fungsi untuk mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Fungsi lain dari badan legislatif adalah sebagai forum kerjasama antara berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana ada beraneka ragam pendapat yang dibicarakan. Selain itu, badan legislatif juga mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan. Dimana dalam fungsi ini, masyarakat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media massa. Maka masyarakat dapat sadar dan mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian kualitatif (Saryono 2010), yang akan mengkaji bagaimana strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenangkan calon muslim pada pemilihan legislatif di kota Manado 2019. Staretegi disini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Admin Nursal (2004), tentang jenis strategi, yaitu strategi defensive, strategi ofensif, strategi pencitraan, serta strategi ketokohan dan kelembagaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa dengan tahapan melakukan reduksi data, display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam pemilihan anggota legislative di Kota Manado tahun 2019, Partai Amanat Nasional melakukan beberapa staretegi untuk memenangkan para calon yang diusung oleh partai. Adapun bentuk strategi yang dilakukan sangat bervariasi. Berikut beberapa strategi yang dimainkan oleh PAN:

1. Strategi Defensif

Jika merujuk pada teori bahwa Strategi defensif akan muncul ke permukaan apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintah yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritas pasar. Selain itu, strategi ini muncul apabila sebuah pasar tidak dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Dalam strategi mempertahankan pasar, partai harus mempertahankan pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung. Partai-partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai partai yang menerapkan strategi ofensif.

Maka Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikategorikan sebagai partai menengah sangat memerlukan strategi ini, selain karena partai ini sudah mengikuti beberapa kontestasi pemilihan, partai dengan lambang matahari putih ini juga memiliki basis massa yang jelas, hal itu juga dibenarkan oleh ketua DPD PAN kota Manado , bahwa strategi bertahan sangat dibutuhkan oleh partainya, karna dalam 2 kali pemilihan terakhir, PAN mendapatkan 4 kursi di DPRD kota Manado .

2. Strategi Ofensif

Merujuk pada teori bahwa strategi ofensif adalah strategi ini memperluas pasar dan menembus pasar adalah kuncinya. Strategi ini sangat dibutuhkan apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah masa pemilihnya. Dalam hal ini, harus ada banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik dapat berhasil. Strategi perluasan pasar, bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu harus ada suatu penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Strategi ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran-penawaran lainnya dari partai-partai lainnya. Perluasan pasar ini dapat dicapai dengan isu dan agenda kampanye yang bermutu dan kreatif.

Dalam hasil wawancara, dengan Ketua DPD PAN kota Manado ,yang juga merupakan Anggota DPRD terpilih, bobby daud, PAN kota Manado tidak begitu mengunggulkan strategi ini, karena PAN sudah punya Basis massa yang jelas, Hanya saja, dalam kampanye kemarin, Partai kami selalu memberikan edukasi seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin belum terlalu faham dan mengerti tugas dan fungsi DPRD dan melakukan pendampingan terhadap aspirasi masyarakat, hal itu yang memberikan nilai tambahan terhadap Partai kami.

3. Strategi Pencitraan

Strategi ini banyak dilakukan di media elektronik seperti televisi dan media sosial seperti facebook dan twitter. Selain itu, media cetak juga sering digunakan para calon untuk membangun pencitraan masing-masing calon. Strategi pencitraan biasanya digunakan untuk membangun pola pikir masyarakat terhadap partai atau calon tertentu.

Strategi semacam ini tentunya dilakukan oleh semua partai, termasuk PAN. Selain untuk meminimalisir dana, startegi ini juga efektif mengingat peran media yang begitu besar dalam mengubah opini masyarakat. Selain itu, lewat media calon juga menyuarakan visi dan misi yang akan dikomentari langsung oleh masyarakat.

4. Strategi Ketokohan dan kelembagaan.

Secara Teori Strategi ini dilakukan oleh caleg yang memiliki peran di masyarakat sebagai seseorang yang dihormati ataupun memanfaatkan ketokohan yang dimiliki orang lain sebagai jaringan untuk mendapatkan suara, dan memantapkan lembaga politik atau lembaga organisasi lainnya yang dimilikinya dalam masyarakat. Strategi ini merupakan strategi kampanye yang merupakan pemikiran dari Arifin (2006;102). Di samping memanfaatkan ketokohan dan memantapkan kelembagaan, diperlukan pula kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat agar proses komunikasi politik berjalan dengan baik.

Strategi ini adalah strategi yang paling efektif bagi PAN, selain hubungan erat PAN dengan Muhammadiyah, PAN juga Punya banyak Tokoh masyarakat di internal partainya. Strategi seperti ini tentunya diterapkan oleh partai PAN, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan yang punya basis massa yang jelas, serta tokoh-tokoh agama dari muhammadiyah yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat yang ada di internal partai PAN seperti ketua DPD PAN Manado , Bobby daud, juga menjadi pendongkrak keberhasilan partai ini, sebagai contohnya, beliau pernah bertarung dalam Pilwako tahun 2015 di kota Manado sebagai calon wakil walikota.

Disamping itu, PAN juga mengandalkan Visi dan misi partai, juga motto Partai. Dengan motto Nasionalis-agamais, PAN bisa merangkul semua kalangan masyarakat, tanpa memandang perbedaan ras, status sosial, bahkan agama. Hal ini yang membuat partai ini berhasil mendapatkan 1 fraksi full di DPRD kota Manado . Dan capaian itu sesuai dengan Target PAN dalam pemilihan legislative di kota Manado tahun 2019.

PENUTUP

1. Strategi kemenangan PAN dalam memenangkan calon muslim pada pemilihan Anggota DPRD kota Manado menerapkan beberapa strategi, diantaranya strategi ofensif, strategi defensif, strategi pencitraan dan strategi ketokohan dan kelembagaan.
2. Perekrutan calon anggota DPRD dilakukan dengan melihat pengalaman dan kesiapan calon, selain itu calon anggota DPRD yang ikut serta dalam pemilihan, sebelumnya telah melewati pelatihan kader dasar yang dilakukan oleh partai agar para calon siap dalam kontestasi ini. Serta 3 hal utama yang menjadi pegangan dari seluruh calon PAN yaitu Moralitas, integritas dan intelektual.
3. Strategi mempertahankan Pemilih yang dilakukan partai sangat berhasil, selain sejarah dan basis massa yang jelas, kader partai PAN tetap menjaga Silaturahmi, bukan hanya dengan muhammadiyah atau toko agama seiman, tapi kepada semua golongan masyarakat,

4. Motto partai, sebagai partai nasionalis agamais, yang menjadikan partai ini partai umum, terbuka untuk semua, juga menjadi nilai tambahan bagi partai ini karena bisa merangkul kemajemukan yang ada di Kota Manado .
5. Strategi yang dijalankan oleh partai ini sangat berhasil, bisa di buktikan dengan capaian 4 kursi di DPRD kota Manado , yang sesuai dengan target partai yaitu mendapatkan 1 fraksi Full di DPRD kota Manado .

DAFTAR PUSTAKA

- Adman Nursal,(2004) *Political Marketing: Strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
- Bogdan, Robert dan Taylor,(1996).*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan oleh J Moleong, Surabaya : Usaha Nasional.
- Budiardjo, Mirriam.(2018). *Partisipasi dan Parpol*, PT Gramedia, Jakarta.
- Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Faturohman Deden dan Sobari Wawan.(2004). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: PT Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jainuddin,(2014). *Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kota Samarinda*. (Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Mulawarman Samarinda.)
- Jekson Limbong.(2009). *Sosialisasi Politik DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004*. Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.
- Kencana Syafiie, Inu. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Maswadi.(1993).*Komunikasi Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Maran, Rafael Raga. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:Asdi Mahasatya.
- M. Rusli Karim. (1993). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*.Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.
- Muslim Mufti. (2015) *Teori-Teori Politik*. Bandung : Pustaka setia.
- Nasution, Noviantika.(2006) *Bobolnya Kandang Banteng: SebuahOtokritik*. Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
- Sidarta GM. (2008) *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*. Ciputat:Kalam Pustaka.
- Siswanto, Victorianus, Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pusta Setia.
- Soekanto, Soejono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.